



Media Title	Koran Tempo	
Date	25 November 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	28	Article Size
Journalist	Ali Anwar	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

PENUTUPAN JALAN LANGGAR

Warga Halangi Pembangunan Tol Cijago

Warga mengklaim Jalan Langgar milik 43 ahli waris.

Ali Anwar

alianwar@tempo.co.id

DEPOK — Puluhan warga dari Rukun Warga (RW) 2 dan 3 Kemirimuka, Beji, Kota Depok, menutup Jalan Langgar, yang selama ini dijadikan akses pengerjaan Jalan Tol Cinere-Jagorawi, kemarin. Akibat penutupan akses jalan tersebut, pengerjaan terowongan (*underpass*) Jalan Margonda Raya lerencan mundur dari jadwal.

Jalan itu ditutup oleh warga dengan alasan ganti rugi yang belum dibayarkan. Warga mengklaim jalan tersebut milik mereka. "Ini tanah warisan kami, bukan milik pemerintah. Jadi, kami tutup sampai ada kejelasan pembayaran," kata Matige Amar, 55 tahun, kemarin.

Pada 23 Juni lalu, akses jalan ini juga pernah ditutup warga. Mereka menghadang sebuah truk yang hendak keluar dari lokasi proyek melalui jalan tersebut. Saat itu, pengunjung rasa meminta kompensasi sebesar Rp 600-750 ribu per bulan apabila jalan tol yang dibangun beroperasi. Penutupan itu berlanjut hingga dua hari.

Pembangunan Jalan Tol Cijago dilakukan secara bertahap dalam tiga seksi. Seksi I sepanjang 3,70 kilometer beroperasi sejak 27 Januari 2012. Sedangkan Seksi II dari Jalan Raya Bogor ke Kukusan sepanjang 3,50 kilometer. Dan Seksi III membentang dari Kukusan sampai Cinere sepanjang 5,44 kilometer. Blokade yang dilakukan warga adalah di area bagian dari pengerjaan Seksi II.

Matige mengatakan, Jalan Langgar sepanjang 1 kilometer itu adalah milik 43 orang ahli waris. Namun Pemerintah Kota Depok mengklaim jalan itu sebagai milik pemerintah. Padahal, kata dia, pemerintah belum pernah membeli tanah itu dari para ahli waris. "Sekarang diambil oleh pemerintah, kapan mereka membli-ny?" ujarnya.

Warga lain, Dahlan, 43 tahun, mengatakan tanah itu milik adat. Tapi mereka tidak ingin berukuh jika memang masuk jalan tol. Mereka hanya meminta ganti rugi dibayarkan, tidak langsung diambil atas klaim tanah pemerintah. "Pengerjaan itu *dibebasin*, dibayar," kata Dahlan.

Bagian Pemantau Operasional Pengerjaan Tol Cijago Seksi II PT Hutama Karya (HK), Waritno, mengaku sangat kaget oleh penutupan itu. Mereka tidak bisa berbuat banyak

selain membatalkan pengangkutan tanah dari jalan tersebut. "Hari ini langsung tidak ada pekerjaan, yang penting tidak ada bentrok," ujarnya.

Menurut dia, PT HK tidak tahu-menahu soal pembebasan lahan karena mereka hanya mengerjakan konstruksi tol. Pembebasan lahan, kata dia, adalah urusan PT Trans Lingkar Kita Jaya (PT TLKJ) sebagai konsorsium. Waritno menyayangkan adanya gangguan terhadap pengerjaan proyek itu. "Kami pasrah saja," kata dia.

Sampai kemarin sore, Jalan Langgar masih lumpuh karena terhalang bambu yang dipasang warga. Hanya sepeda motor yang bisa melewati jalan tersebut. "Masih ditutup, sudah tiga hari enggak ada truk yang bisa lewat," kata Tito Sugiono, pekerja konstruksi Jalan Tol Cijago.

● RUMAH TIRTA

TERGANJAL DI DUA BIDANG LAHAN

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Achmad Gani Gazali, membenarkan adanya penutupan akses pengerjaan Jalan Tol Cinere Jagorawi (Cijago) oleh para pendemo. Menurut dia, para pendemo yang berjumlah kurang dari sepuluh orang itu menuntut harga yang lebih besar daripada ketetapan tim *appraisal*.

"Padahal sudah di-*appraisal* ulang dua kali, mereka minta lebih tinggi," katanya saat dihubungi kemarin. Sayangnya, Gani tak menyebutkan jumlah permintaan masyarakat dan harga tanah versi tim *appraisal*.

Pengerjaan tol Cijago itu terhambat oleh dua bidang tanah yang belum dibayar. Pembayaran lahan terlambat karena sang pemilik tidak diketahui keberadaannya saat tim sedang membebaskan tanah. "Saya enggak tahu berapa yang punya, tapi cuma satu dua bidang lahan yang belum," katanya.

13 Mei 2013

Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Kota Depok menetapkan harga tanah yang akan tekena proyek Jalan Tol Cijago sebesar Rp 1,52 juta.

15 Maret 2013

Perwakilan warga Kukusan, Depok, mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia. Mereka menilai penentuan harga atas dasar pembagian zona yang diajukan P2T berdampak pada perbandingan harga yang timpang.

17 Maret 2014

Tin P2T mengatakan anggaran pembebasan lahan Tol Cijago seksi II melonjak dari 1,671 triliun menjadi Rp 2,9 triliun, karena harga tanah naik.

20 Maret 2014

Kementerian Pekerjaan Umum melakukan *groundbreaking* pembangunan Jalan Tol Cijago seksi II. Proyek diproyeksikan selesai pada Februari 2015.

16 Juni 2014

Warga Kemiri Muka, Beji, resah karena tanahnya belum kunjung dibayar oleh P2T.

23 Juni 2014

Puluhan warga RW 03, Kemirimuka, berunjuk rasa dan memblokade Jalan Langgar untuk pengerjaan Tol Cijago, karena proyek menimbulkan polusi udara dan bising.

20 Agustus 2014

Ombudsman RI merekomendasikan penghentian sementara kegiatan fisik pembangunan Tol Cijago, karena warga menilai ada maladministrasi dalam proses pembebasan lahan.

13 November 2014

Warga melaporkan Ketua P2T, Ety Suryahati, ke Polda Metro Jaya karena dinilai tidak teliti dalam membuat dokumen pembayaran tanah. Ety tak memberi tanggapan.

22-24 November 2014

Puluhan warga Kemiri Muka, kembali menutup Jalan Langgar, karena pemerintah tidak mau membayar tanah jalan yang mereka klaim sebagai miliknya. ● ALI HEBERTELHAN TIRTA | ALI ANWAR